



Homepage Journal: <https://jurnal.unismuhpalu.ac.id/index.php/JKS>

Akuntabilitas Dalam Proses Pelaporan Keuangan Organisasi Mahasiswa Akuntansi: Studi Etnometodologi

Accountability In The Financial Reporting Process Accounting Student Organization: Ethnomethodological Study

Sahrul Asdar¹, Fatir Dwi Pamungkas², Rizki Polimengo³, Nina Yusmita Yamin⁴

¹Program Studi Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako, sahrulasdar58@gmail.com

²Program Studi Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako, fathirdwi996@gmail.com

³Program Studi Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako, pr744656@gmail.com

⁴Program Studi Ekonomi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Tadulako, nyusnita.untad@gmail.com

*Corresponding Author: E-mail: sahrulasdar58@gmail.com

Artikel Penelitian

Article History:

Received: 27 Apr, 2026

Revised: 14 May, 2026

Accepted: 25 Jun, 2026

Kata Kunci:

Akuntabilitas;
Etnometodologi;
Laporan Keuangan;
Organisasi Mahasiswa

Keywords:

Accountability;
Ethnomethodology;
Financial Reports;
Student Organizations

DOI: 10.56338/jks.v9i6.11320

ABSTRAK

Penelitian ini berangkat dari fenomena bahwa akuntabilitas dalam organisasi mahasiswa sering kali direduksi menjadi sekadar prosedur administratif formal. Padahal secara substansial, akuntabilitas dibentuk melalui interaksi sosial yang dinamis. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara mendalam bagaimana anggota Himpunan Mahasiswa Akuntansi (Himaksi) Universitas Tadulako memaknai, mempraktikkan, dan memelihara akuntabilitas dalam proses penyusunan laporan keuangan. Menggunakan pendekatan kualitatif melalui metode etnometodologi, studi ini berfokus pada "keaslian" tindakan anggota dalam situasi sehari-hari. Data dihimpun melalui observasi partisipatif dan wawancara mendalam guna menangkap realitas percakapan, tindakan, dan rutinitas organisasi. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa akuntabilitas dalam organisasi tidak hanya bersumber dari aturan formal, melainkan terkonstruksi melalui rutinitas praktis (*ordinary activities*) seperti pembagian tugas secara kolektif, verifikasi silang antar anggota, serta dialog informal yang terjadi selama proses penyusunan laporan. Praktik-praktik keseharian ini berfungsi sebagai mekanisme pemeliharaan kepercayaan (*trust*) dan penegasan tanggung jawab individu di dalam kelompok. Studi ini menunjukkan bahwa norma sosial dan relasi interpersonal antar anggota secara signifikan memengaruhi derajat akuntabilitas dibandingkan dengan kepatuhan terhadap instruksi tertulis semata. Penelitian ini menyimpulkan bahwa akuntabilitas merupakan produk dari konstruksi sosial yang dinamis dan terus diproduksi melalui

interaksi berulang. Implikasi dari penelitian ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola organisasi mahasiswa harus mempertimbangkan aspek budaya organisasi dan praktik sosial yang telah mengakar, bukan hanya berfokus pada penguatan aturan formal.

ABSTRACT

This research stems from the phenomenon that accountability in student organizations is often reduced to mere formal administrative procedures. Yet, substantially, accountability is formed through dynamic social interactions. This study aims to explore in depth how members of the Accounting Student Association (Himaksi) at Tadulako University interpret, practice, and maintain accountability in the process of preparing financial reports. Using a qualitative approach through ethnomethodology, this study focuses on the "authenticity" of members' actions in everyday situations. Data were collected through participant observation and in-depth interviews to capture the reality of conversations, actions, and organizational routines. The results reveal that accountability in the organization does not only originate from formal rules but is constructed through practical routines (ordinary activities) such as collective task allocation, cross-verification between members, and informal dialogue that occurs during the report preparation process. These daily practices serve as mechanisms for maintaining trust and affirming individual responsibility within the group. This study shows that social norms and interpersonal relationships between members significantly influence the degree of accountability compared to mere compliance with written instructions. This research concludes that accountability is a product of dynamic social construction and is continuously produced through repeated interactions. The implications of this research emphasize that strengthening student organization governance must consider aspects of organizational culture and entrenched social practices, rather than solely focusing on strengthening formal rules.

PENDAHULUAN

Dalam banyak kasus, akuntabilitas pengelolaan keuangan dianggap sebagai sesuatu yang formal, diukur, dan berdasarkan standar tertentu. Namun, ketika ide ini dimasukkan ke dalam komunitas mahasiswa, terutama Himpunan Mahasiswa Akuntansi, hasilnya tidak selalu sesuai dengan standar yang ditetapkan. Sebaliknya, mahasiswa akuntansi memiliki kemampuan untuk membuat laporan keuangan yang sistematis dan sesuai prosedur. Namun, praktik organisasi biasanya lebih fleksibel dan situasional, dan kadang-kadang bahkan diputuskan oleh pengurus. Hal ini menimbulkan pertanyaan yang menarik: apakah pengembangan akuntabilitas dalam organisasi mahasiswa benar-benar diajarkan, atau apakah itu hanya praktik sosial yang berkembang secara alami?

Jika diperhatikan lebih jauh, penyusunan laporan keuangan kelompok mahasiswa adalah lebih dari sekadar aktivitas teknis yang mencatat pendapatan dan pengeluaran; itu adalah proses yang melibatkan komunikasi, perundingan, dan pemahaman. Misalnya, bagaimana bendahara membuat

keputusan tentang format laporan yang akan digunakan, bagaimana laporan tersebut dipahami oleh anggota lain, dan bagaimana laporan tersebut dibahas di forum organisasi. Proses-proses ini sering disesuaikan dengan situasi, norma, dan budaya organisasi. Di titik ini, akuntabilitas tidak lagi sekadar gagasan normatif, tetapi menjadi praktik yang terintegrasi dalam kehidupan organisasi.

Ada banyak penelitian yang membahas akuntabilitas dalam berbagai konteks. Penelitian oleh Sitorus et al. (2025) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan pilar utama manajemen keuangan publik untuk mencapai tata kelola yang baik. Transparansi memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi mengenai pengelolaan anggaran, sementara akuntabilitas menekankan kewajiban pemerintah untuk mempertanggungjawabkan penggunaan sumber daya keuangan secara tepat dan akurat. Namun, berbagai tantangan masih ada dalam implementasinya, seperti keterbatasan teknologi, kapasitas sumber daya manusia, dan budaya organisasi yang belum sepenuhnya mendukung prinsip-prinsip ini.

Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Wardani et al. (2021) meneliti akuntabilitas dalam konteks organisasi mahasiswa. Hasil studi ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam manajemen keuangan memiliki pengaruh positif terhadap kualitas laporan akuntabilitas program. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat akuntabilitas di antara para pemimpin organisasi, semakin baik kualitas laporan keuangan yang dihasilkan, khususnya dalam hal relevansi, keandalan, dan keterbandingan informasi.

Studi lain juga menunjukkan bahwa nilai-nilai sosial dan konteks organisasi, bukan hanya aturan formal, sering memengaruhi praktik akuntabilitas (Setyanto et al. 2022). Namun, Rahayu (2014) menekankan bahwa akuntabilitas terkait dengan laporan yang dibuat dengan baik dan bagaimana pihak yang berkepentingan memahami dan mempercayainya. Akuntabilitas memiliki dimensi sosial yang kuat, seperti yang ditunjukkan oleh penelitian-penelitian tersebut. Namun, banyak penelitian masih berfokus pada organisasi yang formal atau berbasis komunitas, dan tidak banyak yang secara khusus mempelajari praktik akuntabilitas dalam organisasi mahasiswa apalagi dengan pendekatan yang benar-benar mempelajari kebiasaan sehari-hari.

Di sinilah perbedaan penelitian terletak, yang kemudian menjadi alasan penting untuk melakukan studi ini. Seringkali, "apa yang seharusnya dilakukan" bukan "apa yang benar-benar dilakukan" yang menjadi fokus penelitian tentang laporan keuangan organisasi mahasiswa. Namun, untuk memahami akuntabilitas secara keseluruhan, sangat penting untuk melihat bagaimana praktik ini dipraktikkan di dunia nyata, yang termasuk berbagai persetujuan, penyesuaian, dan interpretasi yang dilakukan oleh para pelaku. Dengan kata lain, masih ada ruang untuk mempertimbangkan akuntabilitas sebagai praktik sosial yang dibangun melalui interaksi sehari-hari daripada sekadar tanggung jawab administratif.

Berdasarkan gagasan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Himpunan Mahasiswa Akuntansi menerapkan praktik akuntabilitas dalam pembuatan laporan keuangan.

Pendekatan etnometodologi dipilih karena memungkinkan peneliti untuk masuk ke dalam dunia keseharian para pengurus, melihat bagaimana mereka bekerja, berinteraksi, dan memberi makna terhadap apa yang mereka lakukan. Penelitian ini tidak hanya mencari tahu apakah laporan keuangan telah sesuai dengan standar; itu juga mencoba memahami bagaimana standar ditafsirkan, dinegosiasikan, atau bahkan diabaikan dalam kehidupan nyata.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah antara pendekatan normatif dan praktik akuntabilitas di lapangan. Dengan menggunakan perspektif etnometodologi, penelitian ini menawarkan sudut pandang yang berbeda bahwa akuntabilitas adalah proses sosial yang berkelanjutan yang dibangun melalui interaksi antara anggota organisasi. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan akuntansi, terutama tentang praktik akuntabilitas di lingkungan nonformal seperti kelompok mahasiswa. Penelitian ini juga dapat menjadi sumber refleksi bagi pengurus organisasi mahasiswa untuk memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang praktik yang diterapkan serta peluang untuk perbaikan yang lebih realistis dan kontekstual.

LANDASAN TEORI

Etnometodologi

Etnometodologi adalah pendekatan sosiologi yang berfokus pada bagaimana orang secara aktif membentuk dan mempertahankan keteraturan sosial melalui tindakan praktis dan kontekstual sehari-hari. Harold Garfinkel menekankan bahwa tindakan-tindakan yang "bertanggung jawab" yaitu tindakan yang dapat diamati dan dilaporkan oleh orang-orang dalam situasi tertentu membangun realitas sosial. (Bilmes 1993; Eisenmann and Lynch 2021). Menurut perspektif ini, akuntabilitas bukan hanya pertanggungjawaban formal; itu adalah praktik sosial yang berasal dari interaksi dan pemaknaan bersama dalam kehidupan sehari-hari.

Selain itu, etnometodologi menganggap konteks sosial sebagai komponen penting dalam memahami tindakan manusia. Menurut etnometodologi, setiap praktik sosial bersifat indeksikal (bergantung pada konteksnya) dan refleksif (menciptakan dan menjelaskan realitas sosial itu sendiri). Oleh karena itu, keteraturan sosial dianggap sebagai hasil dari proses interaksi terus-menerus yang direproduksi oleh aktor melalui praktik rutin, bahasa, dan simbol. Metode ini memungkinkan para peneliti untuk melihat bagaimana interaksi sosial yang dipengaruhi oleh norma, nilai, dan kepentingan kolektif dalam organisasi, termasuk praktik akuntansi, menjalankan, menegosiasikan, atau mengubah prosedur dan sistem formal. (Hidayati, Triuwono, and Baridwan 2018).

Untuk penelitian ini, etnometodologi relevan karena dapat menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas dalam pembuatan laporan keuangan adalah hasil dari konstruksi sosial yang dipengaruhi oleh interaksi antara anggota organisasi mahasiswa dan bukan hanya tugas administrasi. Menurut penelitian sebelumnya, nilai moral, budaya, dan kepercayaan masyarakat lebih sering memengaruhi praktik akuntabilitas keuangan daripada standar formal. (Andayani, Wirajaya, and Badera 2024; Cahyana, Sudarma, and Mulawarman 2024)

Akuntabilitas

Istilah "akuntabilitas" berasal dari kata "accountability" dalam bahasa Inggris, yang berarti "pertanggungjawaban" atau "keadaan yang dimintakan pertanggungjawaban". (Mareta and Fakih 2024) Akuntabilitas pada dasarnya adalah konsep yang menjelaskan kewajiban suatu pihak untuk memberikan pertanggungjawaban kepada pihak lain yang memiliki hak untuk meminta penjelasan atas tindakan, keputusan, dan pengelolaan sumber daya mereka. Akuntabilitas berarti memberikan tanggung jawab atau menjawab serta menjelaskan tindakan dan kinerja seseorang atau pemimpin unit organisasi kepada pihak yang berhak untuk meminta pertanggungjawaban. (Machfiroh 2018). Selanjutnya, Muliana et al. (2023) menegaskan bahwa akuntabilitas publik mencakup pengungkapan semua tindakan yang dilakukan oleh wali amanat selain pelaporan. Akuntabilitas biasanya didefinisikan sebagai kondisi "menjadi bertanggung jawab", yang berarti bahwa seseorang atau organisasi harus menjelaskan dan membenarkan tindakannya saat berada di bawah pengawasan pihak lain. Dari sudut pandang organisasi dan akuntansi, akuntabilitas juga dianggap sebagai hasil dari hubungan antara pengelola dan agen; dalam hubungan ini, agen atau pemberi amanah diharuskan untuk menyampaikan informasi dan bertanggung jawab atas kinerjanya kepada pemberi amanah. (Kholmi 2011). Akibatnya, akuntabilitas adalah penting dalam hubungan timbal balik yang membutuhkan transparansi, pelaporan, dan mekanisme evaluasi untuk tindakan yang dilakukan.

Akuntabilitas telah berkembang dari sekadar kewajiban administratif menjadi alat kontrol sosial untuk menjaga integritas dan legitimasi institusi. Ini muncul sebagai tanggapan atas asimetri informasi dan kemungkinan konflik kepentingan antar aktor, yang membuat akuntabilitas menjadi konstruksi sosial yang membentuk kepercayaan dalam suatu komunitas atau organisasi. Proses pelaporan yang menyeluruh, sistematis, dan mudah diakses yang memberikan transparansi publik memastikan bahwa organisasi, terutama organisasi nirlaba atau lembaga pendidikan menjadi akuntabel. (Setiawan and Shaleh 2023). Selain itu, nilai-nilai etika, norma kolektif, dan praktik sehari-hari adalah bagian dari akuntabilitas yang membentuk cara seseorang melihat tanggung jawabnya. Akibatnya, akuntabilitas tidak hanya bersifat formal tetapi juga kontekstual dan kultural.

Akuntabilitas menjadi landasan teoritis yang relevan untuk penelitian ini karena interaksi sosial, nilai, dan kebiasaan mahasiswa akuntansi mempengaruhi cara mereka membuat laporan keuangan. Pendekatan etnometodologi dapat membantu peneliti memahami bagaimana anggota organisasi "mengkonstruksi" akuntabilitas dengan mencatat, melaporkan, dan memberikan informasi keuangan kepada anggota lainnya. Di sini, akuntabilitas dianggap tidak hanya sebagai peraturan yang harus dipatuhi, tetapi juga sebagai praktik sosial yang dibicarakan, dipahami, dan dilakukan dalam organisasi mahasiswa. Oleh karena itu, teori akuntabilitas sangat penting untuk menjelaskan bagaimana proses pertanggungjawaban keuangan memiliki makna sosial yang membentuk kepercayaan dan legitimasi dalam organisasi.

Laporan keuangan

Laporan keuangan, dalam literatur akuntansi, didefinisikan sebagai representasi terstruktur dari posisi keuangan, kinerja, dan arus kas suatu organisasi. Laporan ini disusun berdasarkan prinsip dan

standar akuntansi dan dimaksudkan untuk memberikan informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Laporan keuangan menunjukkan hasil operasi perusahaan dan kondisi ekonomi selain berfungsi sebagai alat untuk berkomunikasi dengan pemangku kepentingan dan pengelola. Menurut Wantah (2015) Laporan keuangan, hasil akhir dari proses akuntansi suatu entitas, digunakan oleh pengguna sebagai sumber informasi dalam proses pengambilan keputusan. Sukanta (2022) memberikan penjelasan bahwa laporan keuangan adalah hasil dari proses pencatatan, penggabungan, dan pengikhtisaran semua transaksi yang dilakukan entitas dengan pihak-pihak yang terkait dengan operasinya. Laporan keuangan dibuat dengan tujuan utama untuk membantu pengguna membuat keputusan ekonomi dengan memberikan informasi keuangan. (Arifin 2003). Selain itu, Agrawal (2023) menegaskan bahwa laporan keuangan memiliki peran sentral dalam menyediakan informasi yang relevan dan andal untuk menilai kinerja, likuiditas, dan keberlanjutan entitas, sekaligus menjadi dasar dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan oleh berbagai pihak berkepentingan.

Selain itu, laporan keuangan berfungsi sebagai praktik sosial yang penting, penuh makna, dan bergantung pada nilai dan hubungan kekuasaan daripada dokumen teknis. Pihak yang mengelola sumber daya dan pihak yang memiliki kepentingan terhubung melalui laporan keuangan. Elizabeth et al. (2025) menunjukkan bahwa pengendalian internal yang efektif, kemampuan sumber daya manusia, dan dukungan sistem teknologi sangat memengaruhi kualitas pelaporan keuangan; semuanya ini meningkatkan transparansi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap perusahaan. Seperti yang ditunjukkan oleh penelitian tentang organisasi keagamaan, penyusunan laporan keuangan sering dipengaruhi oleh nilai-nilai lokal, tingkat pemahaman aktor, dan budaya organisasi. Hal ini menyebabkan bentuk pelaporan yang beragam dan tidak selalu sesuai dengan standar formal.

Teori laporan keuangan menjadi relevan untuk penelitian ini karena memberikan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana praktik akuntabilitas diwujudkan dalam penyusunan laporan keuangan organisasi mahasiswa. Sebagai entitas non-profit, Himpunan Mahasiswa Akuntansi mengacu pada praktik pelaporan yang dipengaruhi oleh norma akuntansi serta pemahaman anggota tentang apa yang mereka katakan. Dengan menggunakan pendekatan etnometodologi, para peneliti dapat menemukan bagaimana anggota organisasi secara aktif "menciptakan" arti akuntabilitas melalui praktik penyusunan laporan keuangan; ini termasuk cara mereka melihat transparansi, kejujuran, dan tanggung jawab dalam konteks organisasi mereka. Dengan demikian, teori laporan keuangan berfungsi sebagai dasar normatif dan juga sebagai pintu masuk untuk memahami realitas sosial yang melatarbelakangi praktik laporan keuangan.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif berdasarkan etnometodologi. Fokus penelitian adalah bagaimana aktor organisasi menjalankan, memahami, dan menghasilkan praktik akuntabilitas. Metode ini dipilih karena mampu menangkap secara mendalam realitas sosial, terutama tentang bagaimana anggota organisasi melihat penyusunan laporan keuangan sebagai bagian dari aktivitas sehari-hari yang seringkali dianggap biasa tetapi sarat makna. Fokus penelitian adalah Himpunan Mahasiswa Akuntansi Universitas Tadulako karena mereka merupakan konteks sosial yang unik dan relevan dengan tujuan penelitian.

Untuk mengumpulkan data, wawancara mendalam digunakan untuk mengetahui pengalaman, pemahaman, dan praktik nyata yang dilakukan oleh para aktor selama proses penyusunan laporan keuangan. Informasi penelitian dipilih secara purposive berdasarkan posisi dan keterlibatan langsung dalam operasi keuangan organisasi. Tiga informan utama dalam kasus ini adalah Ketua Umum, yang berfungsi sebagai pengambil kebijakan, dan dua bendahara, yaitu Bendahara Keuangan dan Bendahara Akuntansi, yang bertanggung jawab secara teknis untuk menyusun dan melaporkan keuangan.

Analisis data dilakukan menggunakan tahapan dalam etnometodologi, yaitu, indeksikalitas, pengelompokan indeksikalitas, reflektivitas, analisis aksi kontekstual, dan penyajian common sense knowledge of social structures. Peneliti tidak hanya berupaya mengidentifikasi apa yang dilakukan, tetapi juga bagaimana para aktor menjelaskan dan mempertanggungjawabkan praktik tersebut. Pola-pola praktik ini muncul dari cerita informan dan bagaimana mereka membangun pemahaman mereka tentang akuntabilitas dalam konteks organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini mencakup lebih dari sekadar prosedur formal; itu juga mengeksplorasi praktik sosial yang membentuk tanggung jawab untuk menyusun laporan keuangan di organisasi mahasiswa

HASIL DAN PEMBAHASAN

Praktik Akuntabilitas melalui Pembagian Peran dalam Penyusunan Laporan Keuangan

Praktik Akuntabilitas organisasi dapat dilihat sebagai hasil dari interaksi sosial, bukan hanya sebagai mekanisme teknis. Pola hubungan, arti, dan interpretasi yang berkembang dalam interaksi sehari-hari antar anggota menciptakan ketentuan ini. Dalam etnometodologi, tindakan yang dilakukan oleh aktor organisasi dianggap sebagai tindakan yang bertanggung jawab, yaitu tindakan yang dapat diamati, dijelaskan, dan dipahami oleh anggota lain dalam praktik bersama.

Selain itu, tindakan tersebut mencerminkan ide reflektivitas (reflexivity), yang berarti bahwa tindakan tidak hanya mengikuti struktur yang ada, tetapi juga membentuk dan memperkuat struktur tersebut. Akibatnya, praktik akuntabilitas muncul secara konsisten melalui aktivitas sehari-hari yang tampaknya sederhana tetapi memiliki makna sosial yang signifikan.

Penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan di Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKSI) disusun secara terstruktur, bukan secara individu. Ada dua jenis bendahara dalam struktur ini: bendahara keuangan dan akuntansi. Masing-masing memiliki tujuan yang berbeda, tetapi keduanya saling berhubungan. Menurut informasi yang diberikan oleh informan:

“Bendahara keuangan itu yang mencatat setiap transaksi... bendahara akuntansi yang membuat laporan keuangannya.”

Pemisahan peran ini dapat dilihat secara kasat mata sebagai bentuk pengendalian internal. Namun, dari sudut pandang etnometodologi, praktik tersebut memiliki makna sosial yang lebih dalam selain berfungsi secara teknis. Pembagian tugas ini memungkinkan anggota organisasi untuk membuat dan mempertahankan pemahaman yang sama tentang bagaimana akuntabilitas seharusnya dilakukan.

Dalam situasi ini, pembagian peran mencerminkan ide reflektivitas, yaitu tindakan sosial mencerminkan dan membentuk struktur. Pengelolaan keuangan dilakukan secara sistematis dan dapat diandalkan dengan pencatatan dan laporan yang dibuat oleh bendahara keuangan dan akuntansi.

Lebih lanjut, praktik ini juga menunjukkan bagaimana akuntabilitas diproduksi melalui “accountable actions”, yaitu tindakan-tindakan yang dapat dijelaskan, diamati, dan dipahami oleh anggota lain. Pemisahan fungsi memungkinkan setiap proses keuangan menjadi lebih transparan secara sosial, karena setiap tahap memiliki pelaku yang jelas. Oleh karena itu, laporan keuangan adalah hasil dari serangkaian tindakan yang dapat diterima secara sosial. Selain itu, pembagian peran ini menunjukkan bahwa organisasi memiliki pengetahuan umum. Pembagian tugas adalah sesuatu yang “wajar” dan “seharusnya” dilakukan oleh anggota organisasi. Pemahaman ini diterima sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari, meskipun kadang-kadang dipertanyakan. Dalam etnometodologi, ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dibangun melalui pengetahuan praktis yang digunakan aktor setiap hari dan aturan formal. Oleh karena itu, jelas bahwa pembagian peran dalam HIMAKSI adalah praktik sosial yang berfungsi untuk menciptakan keteraturan, kejelasan, dan legitimasi dalam pengelolaan keuangan organisasi. Ini bukan sekadar mekanisme teknis.

Akuntabilitas sebagai Proses Berurutan dan Sistematis

Hasil penelitian berikutnya menunjukkan bahwa penyusunan laporan keuangan dilakukan melalui proses yang berurutan, dimulai dengan pencatatan transaksi hingga penyusunan laporan akhir; proses ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan organisasi dilakukan secara sistematis. Menurut informasi yang diberikan oleh informan:

“Dicatat sama bendahara keuangan terlebih dahulu... kemudian bendahara akuntansi menyusun laporan keuangan.”

Secara konvensional, prosedur ini dapat dianggap sebagai tahap akuntansi yang umum. Fokus etnometodologi, bagaimanapun, bukan hanya urutan proses; sebaliknya, itu adalah bagaimana aktor memahami dan menerapkan urutan tersebut. Konsep indeksikalitas, yang berarti bahwa makna suatu tindakan sangat bergantung pada konteksnya, tercermin dalam urutan tindakan ini. Pencatatan transaksi, misalnya, dianggap tidak hanya sebagai tugas administratif tetapi juga sebagai langkah awal untuk memastikan integritas seluruh proses keuangan. Demikian pula, menyusun laporan keuangan menjadi penting karena didasarkan pada data yang telah dicatat sebelumnya.

Proses berurutan ini juga menunjukkan bahwa hubungan antar tindakan menciptakan akuntabilitas. Setiap tahap bergantung satu sama lain, dan jika salah satu tahap tidak dilakukan dengan baik, maka keseluruhan proses akan menjadi tidak penting lagi. Ini menunjukkan bahwa tanggung jawab tidak hanya terletak pada hasil akhir tetapi juga pada cara proses dijalankan. Praktik ini juga menunjukkan bagaimana anggota organisasi bekerja sama untuk mencapai pemahaman bersama tentang apa yang dianggap sebagai “proses yang benar”. Semua pihak mengikuti semacam standar tidak tertulis yang menetapkan urutan dari pencatatan hingga pelaporan. Ini disebut dalam etnometodologi sebagai produksi keteraturan sosial di mana pola yang dianggap normal dan dapat diterima dihasilkan

oleh tindakan rutin. Oleh karena itu, proses berurutan dalam pembuatan laporan keuangan berfungsi sebagai sarana sosial untuk menumbuhkan dan mempertahankan akuntabilitas dalam perusahaan selain menunjukkan sistem kerja.

Penggunaan Bukti Transaksi sebagai Praktik Verifikasi Sosial

HIMAKSI sangat bergantung pada dokumen pendukung seperti nota, struk pembayaran, dan bukti transaksi lainnya selama proses penyusunan laporan keuangan. Menurut informasi yang diberikan oleh informan:

“Bukti-bukti transaksi kayak nota... penting sekali karena bisa jadi bukti bahwa transaksi benar-benar terjadi.”

Sebagian besar, menggunakan bukti transaksi dianggap sebagai bagian dari proses akuntansi. Namun, dari sudut pandang etnometodologi, dokumen tersebut memiliki tujuan yang lebih luas: membantu membangun realitas sosial tentang kebenaran dan keabsahan suatu transaksi.

Bukti transaksi adalah "acccount", yaitu sesuatu yang memungkinkan tindakan dijelaskan dan dipertanggungjawabkan. Suatu transaksi akan kehilangan legitimasi sosialnya jika tidak ada bukti. Dengan kata lain, tindakan keuangan menjadi "terlihat nyata" dan dapat dipercaya jika dokumen tersebut ada. Selain itu, adanya mekanisme verifikasi sosial juga ditunjukkan oleh praktik pengumpulan dan penggunaan bukti transaksi. Dokumentasi dapat digunakan dan diperiksa oleh individu. Hal ini memungkinkan proses kontrol yang bersifat kolektif di mana setiap anggota dapat memastikan bahwa pengelolaan keuangan dilakukan secara jujur.

Dalam situasi seperti ini, akuntabilitas dibangun melalui bukti yang dapat dilihat dan kepercayaan. Bukti transaksi menunjukkan bahwa organisasi internalisasi prinsip akuntabilitas dan membantu mengurangi ketidakpastian dan transparansi. Anggota organisasi tidak hanya mengikuti prosedur, tetapi mereka juga memahami pentingnya bukti sebagai dasar pencatatan. Ini menunjukkan bahwa akuntabilitas telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari daripada hanya kewajiban formal.

Akuntabilitas sebagai Praktik Kolektif dan Koordinatif

Akuntabilitas organisasi pada dasarnya adalah proses pemberian informasi dan pertanggungjawaban yang terjadi dalam hubungan antar pihak yang saling terkait dalam suatu sistem organisasi, bukan sebagai tindakan yang berdiri sendiri. Relasi sosial yang terbentuk melalui interaksi antar aktor membentuk praktik akuntabilitas organisasi. (Kholmi 2011)

Dalam situasi ini, tindakan yang dilakukan oleh anggota organisasi tidak hanya bersifat individual; itu merupakan bagian dari praktik kolektif yang dapat diamati dan dipahami secara kolektif. Akuntabilitas dapat didefinisikan sebagai praktik sosial yang kolektif dan koordinasi yang dihasilkan melalui kerja sama antar anggota organisasi. Dengan demikian, keteraturan sosial dibangun

melalui interaksi dan koordinasi antar aktor, di mana setiap tindakan tidak hanya menyampaikan informasi tetapi juga membentuk pemahaman bersama tentang bagaimana praktik akuntabilitas dijalankan.

Penyusunan laporan keuangan di HIMAKSI melibatkan beberapa pihak, yaitu bendahara keuangan, bendahara akuntansi, dan ketua umum. Informan menyatakan:

“Ada bendahara keuangan, bendahara akuntansi, sama ketua umum... jadi saling berkaitan satu sama lain.”

Keterlibatan berbagai pihak ini menunjukkan bahwa akuntabilitas adalah hasil dari interaksi sosial, bukan individu. Dalam etnometodologi, realitas sosial dibangun melalui interaksi antar individu, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan.

Proses pembuatan informasi keuangan secara kolektif ditunjukkan oleh koordinasi antar aktor. Setiap orang memiliki peran dalam proses tersebut, sehingga laporan keuangan adalah hasil dari kerja sama semua orang. Selain itu, interaksi ini menunjukkan adanya refleksivitas, di mana anggota berkomunikasi untuk membangun pemahaman bersama selain bertukar data. Koordinasi membantu karyawan memahami kondisi keuangan dan bagaimana laporan tersebut harus dilakukan. Akibatnya, akuntabilitas HIMAKSI dapat didefinisikan sebagai praktik sosial yang dibangun melalui kolaborasi, koordinasi, dan kerja sama yang dilakukan oleh anggota organisasi.

SOP dan Standar Akuntansi sebagai Sumber Legitimasi Praktik

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik penyusunan laporan keuangan HIMAKSI didasarkan pada kebiasaan atau kesepakatan informal serta standar formal yang ditemukan dalam Standar Operasional Prosedur (SOP). Sebagaimana disampaikan oleh informan, prosedur standar (SOP) ini didasarkan pada ISAK 335, yang merupakan standar yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan organisasi non-profit:

“SOP-nya itu pedoman dari ISAK 335.”

Secara sederhana, SOP ini dapat dianggap sebagai instrumen administratif untuk mengatur alur kerja. Namun, dari sudut pandang etnometodologi, SOP berfungsi sebagai mekanisme pembuatan makna sosial tentang praktik akuntabilitas yang dianggap "benar" dan "sah".

Dalam hal ini, Standar Operasi Prosedur (SOP) dapat dianggap sebagai struktur yang memungkinkan penjelasan dan pertanggungjawaban yang rasional atas tindakan organisasi. Laporan keuangan yang dibuat tidak hanya "benar secara internal" tetapi juga "dianggap benar" dalam konteks standar yang lebih luas ketika anggota organisasi menggunakan standar formal seperti ISAK 335 untuk menjalankan prosedur dan membangun legitimasi atas tindakan mereka.

Selain itu, implementasi prosedur operasional standar (SOP) menunjukkan bahwa ada proses

yang dilakukan untuk mengorganisasikan praktik akuntabilitas. Aturan tertulis kemudian ditetapkan pada praktik yang awalnya mungkin situasional dan fleksibel. Dalam etnometodologi, ini menunjukkan bahwa aturan yang disepakati bersama memproduksi dan mempertahankan keteraturan sosial daripada yang terjadi secara alami. Namun, yang menarik adalah bagaimana prosedur operasi standar (SOP) tersebut diterapkan dalam praktik sehari-hari. Informasi menyatakan bahwa Standar Operasi Prosedur (SOP) dianggap sebagai pedoman yang secara alami diikuti, bukan sebagai aturan yang kaku atau membatasi. Ini menunjukkan proses internalisasi di mana standar formal menjadi bagian dari pengetahuan umum anggota organisasi. Dengan kata lain, anggota sekarang melihat SOP sebagai cara kerja "biasa" daripada sebagai aturan dari luar.

Selain itu, prosedur operasional standar (SOP) berfungsi sebagai alat legitimasi dalam situasi interaksi sosial. Jika laporan keuangan dibuat sesuai dengan Prosedur Operasi Standar (SOP), laporan tersebut lebih mudah diterima oleh anggota lain. Ini karena SOP memberikan dasar objektif yang dapat digunakan untuk menjelaskan tindakan. Dalam situasi ini, prosedur operasi standar (SOP) tidak hanya mengatur tindakan, tetapi juga memberi anggota "bahasa" untuk bertanggung jawab atas tindakan mereka. Oleh karena itu, prosedur operasi standar (SOP) akuntansi HIMAKSI tidak hanya berfungsi sebagai alat teknis tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme sosial yang membantu membentuk, mempertahankan, dan melegitimasi praktik akuntabilitas di dalam perusahaan.

Mekanisme Evaluasi melalui Cross-Check sebagai Kontrol Internal

dalam proses penyusunan laporan keuangan, HIMAKSI menerapkan mekanisme evaluasi melalui kegiatan pengecekan ulang (cross-check). Ketika ditemukan kesalahan dalam pencatatan atau penyusunan laporan, tim akan melakukan verifikasi ulang dan bahkan menyusun kembali laporan tersebut. Sebagaimana diungkapkan oleh informan:

“Kalau ada kesalahan... kita cross-check lagi, kita buat ulang laporan.”

Secara umum, praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk kontrol internal untuk menjaga akurasi data. Namun, dalam perspektif etnometodologi, cross-check bukan sekadar prosedur teknis, melainkan merupakan bagian dari praktik produksi akuntabilitas. Cross-check mencerminkan bagaimana anggota organisasi secara aktif terlibat dalam memastikan bahwa setiap tindakan keuangan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini, akuntabilitas tidak hanya terletak pada hasil akhir (laporan keuangan), tetapi juga pada proses verifikasi yang dilakukan secara berulang. Proses ini menunjukkan bahwa akuntabilitas bersifat prosedural, bukan sekadar output.

Lebih lanjut, praktik cross-check dapat dipahami sebagai bentuk refleksivitas, di mana tindakan pengecekan tidak hanya bertujuan untuk menemukan kesalahan, tetapi juga untuk memperkuat kepercayaan terhadap hasil yang dihasilkan. Dengan melakukan pengecekan ulang, anggota organisasi menciptakan kondisi di mana laporan keuangan dapat dianggap “layak dipercaya”. Selain itu, cross-check juga berfungsi sebagai mekanisme pembelajaran sosial. Melalui proses ini, anggota organisasi tidak hanya memperbaiki kesalahan, tetapi juga memahami bagaimana kesalahan tersebut terjadi. Hal

ini memungkinkan terbentuknya pemahaman bersama tentang praktik yang benar dan yang harus dihindari.

Dalam konteks etnometodologi, praktik ini juga menunjukkan adanya *accountability in action*, yaitu bagaimana akuntabilitas diwujudkan melalui tindakan nyata yang dapat diamati. Cross-check menjadi bukti bahwa anggota organisasi tidak hanya mengklaim akuntabilitas, tetapi benar-benar menjalankannya dalam praktik. Menariknya, praktik ini juga dianggap sebagai sesuatu yang “wajar” oleh anggota organisasi. Tidak ada resistensi terhadap proses pengecekan ulang, melainkan diterima sebagai bagian dari rutinitas kerja. Hal ini menunjukkan bahwa mekanisme kontrol telah terinternalisasi sebagai bagian dari budaya organisasi. Dengan demikian, cross-check dalam HIMAKSI tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol, tetapi juga sebagai praktik sosial yang memperkuat akuntabilitas, kepercayaan, dan pembelajaran dalam organisasi.

Transparansi sebagai Praktik Sosial dalam Forum Pleno

Transparansi keuangan dalam HIMAKSI diwujudkan melalui forum rapat pleno, di mana laporan keuangan dipaparkan secara terbuka kepada anggota organisasi. Dalam forum ini, seluruh informasi keuangan, mulai dari pemasukan hingga pengeluaran, disampaikan secara rinci. Sebagaimana disampaikan:

“Lewat pleno... semua laporan keuangan dijabarkan secara jelas, mulai dari pemasukan sampai pengeluaran.”

Dalam pendekatan konvensional, praktik ini dapat dipahami sebagai bentuk transparansi organisasi. Namun, dalam perspektif etnometodologi, yang menjadi fokus bukan hanya keberadaan forum tersebut, tetapi bagaimana forum tersebut memproduksi makna transparansi itu sendiri. Rapat pleno dapat dipahami sebagai arena sosial, di mana akuntabilitas tidak hanya disampaikan, tetapi juga dinegosiasikan dan dikonstruksi bersama. Transparansi dalam konteks ini tidak hadir secara otomatis, melainkan dihasilkan melalui interaksi antar anggota yang terlibat dalam forum tersebut.

Lebih jauh, praktik pemaparan laporan keuangan dalam pleno mencerminkan konsep reflektivitas, di mana tindakan menyampaikan laporan tidak hanya memberikan informasi, tetapi juga membentuk realitas bahwa organisasi tersebut transparan. Dengan kata lain, transparansi bukan hanya sesuatu yang “dimiliki”, tetapi sesuatu yang “dilakukan”. Selain itu, pleno juga berfungsi sebagai mekanisme legitimasi sosial. Ketika laporan keuangan dipresentasikan di hadapan anggota, laporan tersebut mendapatkan pengakuan kolektif. Proses ini membuat laporan tidak hanya sah secara administratif, tetapi juga sah secara sosial.

Dalam konteks ini, kehadiran anggota yang melihat dan mendengar secara langsung menjadi penting. Transparansi tidak hanya terletak pada isi laporan, tetapi juga pada proses penyampaian. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam organisasi tidak hanya berbasis dokumen, tetapi juga berbasis interaksi. Praktik ini juga menunjukkan adanya *common sense understanding*, di mana anggota organisasi memahami bahwa transparansi diwujudkan melalui forum pleno. Pemahaman ini diterima

secara luas dan tidak dipertanyakan, sehingga pleno menjadi simbol utama keterbukaan dalam organisasi. Dengan demikian, transparansi dalam HIMAKSI bukan hanya tentang penyediaan informasi, tetapi merupakan praktik sosial yang diproduksi melalui interaksi, komunikasi, dan pengakuan kolektif dalam forum organisasi.

Akuntabilitas dalam Siklus Keuangan: dari Perencanaan hingga Pelaporan

Temuan penelitian menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas dalam HIMAKSI tidak hanya terbatas pada tahap pelaporan, tetapi mencakup seluruh siklus keuangan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga pertanggungjawaban. Hal ini dijelaskan oleh informan:

“Prosesnya ada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, sampai pertanggungjawaban.”

Selain itu, proses keuangan juga dimulai dari penyusunan anggaran, yang kemudian menjadi dasar dalam pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana. Dalam perspektif etnometodologi, temuan ini menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan praktik yang terdistribusi dalam seluruh tahapan aktivitas organisasi. Artinya, akuntabilitas tidak hanya muncul di akhir (laporan), tetapi dibangun sejak awal melalui perencanaan dan pengambilan keputusan.

Perencanaan anggaran, misalnya, dapat dipahami sebagai bentuk awal dari akuntabilitas. Dalam tahap ini, anggota organisasi sudah mulai membangun “account” mengenai bagaimana dana akan digunakan. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya bersifat retrospektif (melihat ke belakang), tetapi juga prospektif (mengantisipasi ke depan).

Pelaksanaan kegiatan yang mengacu pada anggaran juga menunjukkan adanya kontrol berbasis perencanaan. Setiap pengeluaran tidak dilakukan secara bebas, tetapi harus sesuai dengan rencana yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dibangun melalui keterkaitan antara rencana dan tindakan.

Selanjutnya, pelaporan yang dilakukan secara berkala (triwulan dan tahunan) menunjukkan bahwa akuntabilitas bersifat berulang dan berkelanjutan. Dalam etnometodologi, praktik yang berulang ini berfungsi untuk menciptakan keteraturan sosial. Melalui pengulangan, tindakan menjadi kebiasaan, dan kebiasaan menjadi norma.

Forum seperti pleno dan musyawarah besar (MUBES) juga menjadi bagian penting dalam siklus ini. Dalam forum tersebut, laporan keuangan tidak hanya disampaikan, tetapi juga dievaluasi dan dipahami bersama. Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas merupakan proses yang melibatkan interaksi sosial, bukan hanya aktivitas administratif. Dengan demikian, siklus keuangan dalam HIMAKSI menunjukkan bahwa akuntabilitas adalah praktik yang menyeluruh, berkelanjutan, dan terintegrasi dalam setiap tahap aktivitas organisasi. Akuntabilitas tidak hadir sebagai kewajiban formal semata, tetapi sebagai bagian dari praktik keseharian yang membentuk keteraturan dan kepercayaan dalam organisasi.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dalam proses pelaporan keuangan Himpunan Mahasiswa Akuntansi (HIMAKSI) Universitas Tadulako tidak semata-mata dibentuk oleh kepatuhan terhadap aturan formal, tetapi lahir dan dipelihara melalui praktik sosial yang berlangsung dalam aktivitas organisasi sehari-hari. Pembagian peran antara bendahara keuangan dan bendahara akuntansi, penggunaan bukti transaksi, mekanisme *cross-check*, pelaksanaan forum pleno, serta keterikatan pada SOP menjadi rangkaian tindakan yang secara kolektif membangun dan mempertahankan akuntabilitas.

Melalui perspektif etnometodologi, praktik-praktik tersebut memperlihatkan bahwa akuntabilitas merupakan hasil konstruksi sosial yang terus diproduksi melalui interaksi, koordinasi, dan pemahaman bersama antaranggota organisasi. Dengan demikian, laporan keuangan tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga menjadi media yang merepresentasikan kepercayaan, tanggung jawab, dan legitimasi dalam kehidupan organisasi mahasiswa. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan praktik akuntabilitas lebih banyak ditopang oleh budaya kerja, hubungan interpersonal, dan rutinitas organisasi dibandingkan oleh keberadaan aturan formal semata.

Penelitian ini masih terbatas pada satu organisasi mahasiswa sehingga gambaran yang diperoleh bersifat kontekstual. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya dapat memperluas lokasi penelitian pada berbagai jenis organisasi kemahasiswaan atau organisasi non-profit lainnya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik akuntabilitas dalam konteks yang berbeda. Bagi pengelola organisasi mahasiswa, hasil penelitian ini dapat menjadi refleksi bahwa penguatan akuntabilitas tidak cukup dilakukan melalui penyusunan prosedur dan aturan, tetapi juga perlu didukung oleh pembentukan budaya organisasi yang mendorong keterbukaan, kerja sama, dan tanggung jawab bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, Shivya. 2023. "The Role of Financial Statements in Understanding a Company's Financial Position and Preparing and Analyzing Such Statements." *International Journal of Social Science & Economic Research* 8(07): 1833–46.
- Andayani, Ni Kadek Yuni, I Gde Ary Wirajaya, and I Dewa Nyoman Badera. 2024. "Financial Accountability in Subak Sembung Denpasar Bali." *World Journal of Advanced Research and Reviews*. doi:10.30574/wjarr.2024.21.1.0025.
- Arifin, S. 2003. "Analisis Relevansi Informasi Akuntansi Dalam Laporan Keuangan Perusahaan Berdasarkan Fasb Concept No. 2." *Jurnal Bisnis dan Akuntansi* 5(3): 322–55.
- Bilmes, Jack. 1993. "Ethnomethodology, Culture, and Implicature: Toward an Empirical Pragmatics." *Pragmatics* 3(4): 387–409. doi:10.1075/prag.3.4.02bil.
- Cahyana, Pande Gede, Made Sudarma, and Aji Dedi Mulawarman. 2024. "Exploring Accountability Practices in Village Financial Planning." *JIA (Jurnal Ilmiah Akuntansi)* 9(2): 621–37.
- Eisenmann, Clemens, and Michael Lynch. 2021. "Introduction to Harold Garfinkel's Ethnomethodological 'Misreading' of Aron Gurwitsch on the Phenomenal Field." *Human Studies*. doi:10.1007/s10746-020-09564-1.
- Elizabeth, Roosganda, Ana Rusmardiana, Gilbert Rely, and Loso Judijanto. 2025. "Accountability and Transparency in Local Government Financial Reporting: An Empirical Study in Indonesia." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan* 13(4): 831–42.
- Hidayati, Iwan Triyuwono, and Zaki Baridwan. 2018. "Ethnomethodology Study on the Practice of Informal Accounting Information Systems in Local Government: A Study in Barito Regency, South Kalimantan Province, Indonesia." *Russian Journal of Agricultural and Socio-Economic Sciences*. doi:10.18551/rjoas.2018-05.17.

- Kholmi, Masiyah. 2011. "Akuntabilitas Dalam Perspektif Teori Agensi." *Journal of Innovation in Business and Economics* 2(02).
- Machfiroh, Ines Saraswati. 2018. "Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Benua Tengah." *Jurnal Riset Akuntansi Politala* 1(1): 14–21.
- Mareta, Frisda Cahya, and Firdaus Fakhri. 2024. "Mekanisme Akuntabilitas Pelayanan Publik." *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)* 6(2): 231–40.
- Muliana, Anisa Putri, Ana Sopanah, and Khojanah Hasan. 2023. "Analisis Akuntabilitas Dan Transparansi Laporan Keuangan Di Kelurahan Wonokoyo Kota Malang." *Jurnal Ekonomi Kreatif Indonesia* 1(3): 179–97.
- Rahayu, Ruci Arizanda. 2014. "Transparansi Dan Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Masjid Agung Al-Akbar Surabaya." *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan* 4(2).
- Setiawan, Bagus, and Shaleh Shaleh. 2023. "Akuntabilitas Sebagai Prinsip Pengelolaan Keuangan Lembaga Pendidikan." *AKUA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan* 2(3): 171–76.
- Setyanto, Roberthus, Siti Ridloah, Andina Suryasari, Fakultas Ekonomi, and Universitas Negeri. 2022. "Universitas Negeri Semarang Jurnal Magister Manajemen Unram." 11(3): 228–38. doi:10.29303/jmm.v11i3.737.
- Sitorus, Lestari, Suci Ananda Sitompul, Nazwa Feryal Kamila, and Wahjoe Pangestoeti. 2025. "Transparansi Dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Negara." *Economic Reviews Journal* 4(1): 235–44.
- Sukanta, Tuntun Ariadi. 2022. "Analisis Penerapan PSAK No 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada CV. Mekar Jaya." *Journal Ekonomi, Keuangan, Perbankan Dan Akuntansi Syariah* 1(02): 59–74.
- Wantah, Marshallino Jordy. 2015. "Analisis Penerapan Psak No. 1 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Pada Perum Bulog Divre Sulut Dan Gorontalo." *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi* 15(04): 74–88.
- Wardani, Dewi Kusuma, Anita Primastiwi, and Febby Gloria Usun. 2021. "Pengaruh Akuntabilitas Pengurus Organisasi Dalam Pengelilaan Keuangan Terhadap Kualitas Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) Program Kerja." *Jurnal Disrupsi Bisnis* 4(6): 505.